

## ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk sebagai suatu upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap pungutan liar yang masih menjadi penyakit dalam masyarakat khususnya pada pelayanan publik yang prakteknya masih bisa kita temui dan masih sulit untuk diberantas karena sudah membudaya. Dalam praktiknya pungutan liar adalah memungut uang secara memaksa yang tidak sesuai dengan prosedur atau Standard Oprasional Prosedur tindakan memaksa ini adalah sebuah tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di pelayanan publik serta mengetahui pencegahan tindak pidana pungutan liar.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang relavan. Tahap penelitian melalui kepustakaan yaitu dengan menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan bahan tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan *literature* lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap penegakan tindak pidana yaitu dengan melakukan operasi tangkap tangan, menyelidiki, dan memberi rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah untuk memberikan sanksi, tetapi pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku masih belum sesuai yaitu pada penerapan sanksi yang masih belum sesuai dengan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pencegahan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah sesuai yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pegawai penyelenggara di pelayanan publik guna memberikan kesadaran diri, dan melakukan peningkatan pengawasan internal, serta melakukan investigasi yang lebih mendalam terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

## **ABSTRACT**

Law enforcement is a process that is done to an effort of upright and proper functioning of the legal norms of conduct as in the life of society and State, in this case is law enforcement against the levy of a still wild become a disease in society especially in the practice of public service still can we meet and still difficult to enforce because it is widespread. In practice the levy wild is picking up money in force which does not comply with the procedures or Standard Oprasional Procedure action force is a criminal act which regulated in Act No. 20 Of 2001 Year Eradication Criminal Acts Of Corruption. This research aims to know the rule of law against the perpetrators of the wild collection on public services as well as knowing the prevention of crime charges.

The methods used in this research is the Juridical Normative, that looked identical to the legal norms which are created and enacted by the agency or the competent authority, efforts relate to law enforcement crime against levy. The specifications used are descriptive studies specifications a study that aims to give an overview or concrete clarification about the State of the object or problem that is researched and analyzed the problems movie based on the relavan regulations. The research phase through the library with spool secondary data which is the primary legal materials such as the writings of experts and the results of the work of scientists in the form of paper or paper and tertiary materials i.e. materials that provide information about the law of primary and secondary law, such as dictionaries, the internet and other literature

The research results showed that law enforcement is conducted by the Task Team a Clean Sweep of wild Charges against enforcement of a criminal act that is to perform the operation catching hands, investigate, and make recommendations to the leadership of the Ministry/ institutions, as well as the head of the Government to provide sanctions, but wild charges made by the offender is still not appropriate during the implementation of the sanctions are still not in compliance with article 12 letter e Act No. 20 Year 2001. Prevention is done by Team Clean Sweep task force Wild Charges were in accordance with providing socialization to society and organizer of the employees in the public service in order to give a sense of self, and make improvements to surveillance internally, as well as do a deeper investigation against persons-persons who commit the crime of wild charges.